

PENDIDIKAN POLITIK BAGI GENERASI MUDA MELALUI PARTAI POLITIK

Aina

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, Jl. Prof. Dr. Hamka Padang 25171

e-mail: aina53ppkn@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran partai politik untuk melakukan pendidikan politik bagi generasi muda kader partai atau generasi muda pada umumnya guna mewujudkan generasi muda dengan literasi politik yang baik, berpikir kritis, dan bertanggung jawab dalam peran-peran politiknya. Perhatian partai terhadap program-program pendidikan politik masih terbatas pada kegiatan-kegiatan rutin atau seremonial saja. Diperlukan penelitian untuk menemukan bentuk pendidikan politik yang tepat bagi generasi muda melalui partai politik.

Kata kunci: pendidikan politik, generasi muda, dan partai politik

1. Pendahuluan

Partai politik memiliki peranan dalam pelaksanaan pendidikan politik dan berkewajiban dalam melaksanakan pendidikan politik sebagaimana UU No.2 tahun 2011 dalam pasal 31 ayat 1 sebagai berikut : Partai politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggungjawabnya dengan mempertahankan keadilan dan kesetaraan gender dengan tujuan antara lain : (a) meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ; (b) meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ; dan (c) meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan falsafah bangsa.

Lebih jauh menurut Ramlan Surbakti (1992) faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik seseorang adalah : Pertama, lingkungan sosial politik tak langsung seperti sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya dan media massa. Kedua, lingkungan sosial politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian, seperti keluarga, agama, sekolah dan kelompok pergaulan. Ketiga, struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu. Dalam hal ini terdapat tiga basis fungsional sikap yaitu kepentingan, penyesuaian diri, eksternalisasi dan pertahanan diri. Keempat, lingkungan sosial politik tak langsung berupa situasi yaitu keadaan yang mempengaruhi individu secara langsung ketika hendak melakukan suatu kegiatan seperti cuaca, keadaan keluarga, keadaan ruangan, kehadiran orang lain, suasana kelompok, dan ancaman dengan segala bentuknya.

Untuk membina generasi muda di dalam kehidupan politik diperlukan proses pendidikan politik yang terencana sehingga partai dapat menghasilkan politisi-politisi masa depan yang lebih berkualitas.

2. Pembahasan

Dalam artian umum, pendidikan politik adalah cara bagaimana suatu bangsa mentransfer budaya politiknya dari generasi satu ke generasi kemudian (Panggelean, 1994). Giesecke sebagaimana dikutip Kartini Kartono (2009) mengemukakan beberapa penjabaran

dalam pendidikan politik. Pertama, bildungswissen, yaitu bisa mengetahui bentuk dan gambaran dari manusia serta perkembangannya sehingga orang menjadi sadar akan kekuatan pribadi dan kemampuan bangsa sendiri, sadar akan kekuatan dan kelebihan bangsa sendiri. Kedua, orientierungswissen, yaitu mampu berorientasi pada paham kemanusiaan, secara objektif berani melihat realitas nyata mau mengadakan orientasi ulang terhadap situasi kondisi politik sehingga bisa ditemukan alternatif penyelesaian yang lebih baik. Ketiga, verhaltensweisen, (menunjuk pada tingkah laku) yaitu memahami hukum, norma tata tertib dan peraturanyang menuntun semua tingkah laku politik, sehingga individu menjadi cermat dan lebih bijaksana menanggapi situasi kondisi politik yang kongkrit. Dengan kata lain, individu mampu mengendalikan tingkah laku sendiri dan mau menjunjung tinggi prinsip kesusilaan, tidak egoistis-egosentris. Keempat, aktionwissen artinya (1) mampu bertingkah laku tepat, cermat dan benar sebab didukung oleh prinsip kebenaran dan keadilan ; (2) pendidikan disertai refleksi objektif ; dan (3) wawasan kritis. Prinsip kebenaran dan keadilan harus bersifat universal. Refleksi mengandung kesanggupan mempertimbangkan baik-baik dan mampu melakukan pencerminan kembali peristiwa-peristiwa politik sehingga terjadi pengawasan reflektif serta membuahkan ide-ide untuk mengatasi masalah Lewat kegiatan hati nurani dan tanggungjawab etis politis terhadap sesama manusia akan tumbuh keberanian bertindak dan ketepatan bereaksi.

Dengan kata lain tujuan pendidikan politik yang akan dilaksanakan dapat ditinjau dari beberapa aspek. Pertama aspek kognitif untuk membangun pengetahuan warga negara (masyarakat sipil) tentang konsep-konsep dasar politik dan pemerintahan. Kedua, aspek afektif, untuk membentuk karakter warga negara (masyarakat sipil) yang berpihak kepada demokratisasi dan jati dirinya sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Ketiga, aspek psikomotorik untuk membangun kecakapan intelektual dan moral dalam mewujudkan Indonesia yang demokratis.

Untuk meningkatkan partisipasi generasi muda secara kuantitas maupun kualitas diperlukan proses pendidikan politik secara terus menerus dan komprehensif. Hal ini sesuai dengan tujuan dari pendidikan politik untuk membentuk sikap yang mendukung sistem politik serta menyadarkan individu akan peranannya sebagai partisipan politik. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Irish dan Frank (1978) sebagai berikut :

“process where individual members of a state acquire their feelings and behavioral attitudes about overment and politics generally, their sense of national. Identification, loyalty to the goverment, allegiance to the leadership, and their undestanding of roles they expect/or are,expected) to play as participants in the political system...”

Proses belajar dalam pelatihan pendidikan politik hendaknya menerapkan asas-asas pendidikan kritis. Model pembelajaran yang ditawarkan adalah model ”structural experiences learning cycle” atau daur belajar (dari) pengalaman yang distrukturkan. Proses belajar ini menurut F. Ipur (1999) memang sudah teruji sebagai suatu proses belajar yang juga memenuhi semua tuntutan atau persyaratan pendidikan kritis, terutama karena urutan prosesnya memang memungkinkan bagi setiap orang untuk mencapai pemahaman dan kesadaran atau suatu realitas sosial dengan cara terlibat (partisipasi) sebagai bagian dari realitas tersebut. Adapun tahap-tahapan model ”structural experiences learning cycle” adalah : Pertama, rangkai ulang (rekonstruksi) yakni menguraikan kembali rincian (fakta, unsur-unsur, urutan kejadian dan lain-lain) dari realitas tersebut. Kedua, kaji urai (analisis) yakni mengkaji sebab-sebab dan kemajemukan kaitan-kaitan permasalahan yang ada dalam realitas tersebut. Ketiga, kesimpulan yakni merumuskan makna dan hakekat realitas tersebut sebagai suatu pelajaran dan pemahaman atau pengertian baru yang lebih utuh. Keempat, tindakan yang memutuskan dan melaksanakan tindakan-tindakan baru yang lebih baik berdasarkan hasil pemahaman atau pengertian baru atas realitas tersebut, sehingga

sangat memungkinkan pula untuk menciptakan realitas-realitas baru yang juga lebih baik. Keempat tahapan inilah yang akan dijadikan kerangka dasar dalam pelaksanaan pendidikan politik.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa masyarakat secara umum termasuk juga generasi muda di dalamnya belum melihat upaya yang optimal dari partai untuk melakukan pendidikan politik. Sebut saja yang dalam ingatan para pemuda yaitu menjelang pemilu legislatif, partai selalu dekat dengan masyarakat seperti melakukan loma di bidang keolahragaan, pertemuan-pertemuan dengan kader muda partai sampai kegiatan sosial dan keagamaan. Sedangkan dari segi materi temuan penelitian menunjukkan bahwa masing-masing partai yang diteliti umumnya memberikan materi pendidikan politik berkaitan dengan upaya-upaya untuk menanamkan militansi partai kepada generasi muda kader partai ataupun memberikan pengenalan mengenai visi, misi, landasan filosofi partai kepada generasi muda simpatisan partai agar terjadi perluasan simpatisan pada partai yang bersangkutan.

Sementara itu materi-materi yang diberikan untuk generasi muda kader partai tidak dipisahkan antara anggota-anggota kader partai lainnya. Materi-materi tersebut diberikan sesuai jenjang pengkaderan yang diikuti oleh kader. Sebagai contoh, materi-materi pokok yang diberikan pada generasi muda PAN diantaranya adalah materi yang menyangkut : (1) landasan filosofi partai ; (2) visi, misi, dan program partai ; (3) pemilu ; (4) pengetahuan-pengetahuan praktis tentang kampanye ; dan (5) materi-materi yang menyangkut dengan sosial politik local dan materi-materi lain yang dianggap dapat meningkatkan pengetahuan dan kapasitas generasi muda kader partai.

Materi-materi pendidikan politik hendaknya dipersiapkan sejak dini sehingga ketika diaplikasikan dapat terus dievaluasi demi menemukan materi yang cocok untuk generasi muda sehingga dari pengenalan dan pemahaman mereka terhadap materi-materi tersebut tercapailah apa yang dimaksudkan dalam tujuan pendidikan politik tersebut. Materi-materi tersebut diarahkan pada hal-hal sebagai berikut :

- a) Pengenalan terhadap partai (falsafah, ideologi, visi, misi, strategi dan kebijakan partai).
- b) Penanaman kesadaran berideologi, berbangsa dan bernegara.
- c) Sistem pemilu beserta paeraturan yang ada dalam rezim pemilu.
- d) Etika politik, partisipasi politik, sistem pemerintahan dan peran generasi muda dalam sistem politik.
- e) Hak dan kewajiban warganegara, hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi.
- f) Pengembangan kepribadian, motivasi berprestasi dan bagaimana cerdas secara emosional dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, dan bernegara.

Materi-materi yang berisi pengenalan partai kepada generasi muda mutlak diperlukan mengingat salah satu tujuan partai politik melakukan pendidikan politik kepada generasi muda adalah memberikan wawasan tentang partai, visi, misi, ideology perjuangan dan program partai sehingga generasi muda memahami apa yang diperjuangkan sesuatu partai, mengapa mereka memilih partai tersebut, nilai-nilai apa saja yang akan dibawa oleh tokoh partai tersebut ketika kelak mereka duduk di lembaga legislatif. Sedangkan bagi generasi muda kader partai, materi-materi tersebut berguna bagi mereka untuk membentuk militansi terhadap partai.

Materi-materi yang berisi penanaman kesadaran berideologi, berbangsa, dan bernegara juga penting diberikan karena memperkokoh rasa nasionalisme, membentuk nation and character building, cinta tanah air, dan bangga sebagai bangsa Indonesia dengan kemajemukannya dan tetap dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Materi-materi yang menyangkut sistem pemilu beserta peraturan-peraturan yang ada dalam rezim pemilu memberikan wawasan kepada generasi muda tentang seluk beluk

pemilu, bagaimana urgensi pemilu dalam suatu negara dan suksesi kepemimpinan. Bagaimana sistem pemilu yang demokratis yang mampu menjamin rasa kepastian hukum dan keadilan, tidak saja bagi penyelenggara tetapi juga para pemilih yang telah berupaya menjalankan hak demokrasinya. Pada bagian ini akan diberikan pemahaman tentang hakekat dan arti penting pemilu itu sendiri.

Materi-materi tentang etika politik, partisipasi politik, sistem pemerintahan dan peran generasi muda dalam sistem politik merupakan materi-materi yang diperlukan bagi generasi muda menyangkut isu-isu sosial politik terkini. Materi ini diyakini dapat membangun wawasan generasi muda agar cerdas dalam berpolitik. Termasuk memahami dan sadar akan arti pentingnya generasi muda sebagai generasi penerus harapan bangsa.

Materi-materi yang menyangkut hak dan kewajiban warganegara, HAM dan demokrasi perlu diberikan pada generasi muda mengingat segala aktivitas mereka selalu terikat dengan peraturan hukum dan sistem politik yang berlaku. Bagaimana generasi muda terlibat dalam kehidupan ekonomi, sosial, politik, budaya, dan agama dengan tetap menghormati hak-hak orang lain, memberikan penghormatan atas harkat dan martabat manusia, serta membangun kepercayaan pada pemerintah secara berkelanjutan.

Materi-materi yang menyangkut pengembangan kepribadian, motivasi berprestasi, dan bagaimana cerdas secara emosional dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, dan bernegara mutlak diperlukan. Terlebih dengan kondisi sosial emosional generasi muda yang terbilang dinamis perlu dibangun kesadaran berpolitik yang merupakan salah satu tujuan dari pendidikan politik itu sendiri.

3. Kesimpulan dan Saran

Generasi muda memiliki karakteristik yang sangat menonjol dibandingkan generasi lainnya terutama produktifitas, daya juang, dan juga potensi konflik serta memiliki idealism yang tinggi sehingga mereka terkesan lebih kritis. Dengan potensi demikian, partai politik memiliki peran strategis dalam memfasilitasi pelaksanaan pendidikan politik yang sesuai dengan karakter generasi muda partainya. Oleh sebab itu model pendidikan politik dengan metode kritis dan reflektif dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif dalam pelaksanaan pendidikan politik.

Kemudian disarankan : (1) pemerintah agar lebih memperhatikan proses pelaksanaan pendidikan politik bagi generasi muda melalui kebijakan-kebijakannya ; (2) partai politik hendaknya lebih mengeksplorasi model yang tepat baik dari segi strategi, materi, dan metode pendidikan politik bagi generasi muda kader partainya atau generasi muda pada umumnya.

Daftar Pustaka

- F. Ipur. (1999). *Panduan Pendidikan Politik Untuk Fasilitator*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Irish, Marian D. & Elke Frank. (1978). *Introduction to Comparative Politics*. New Jersey : Prentice – Hall, Inc. Englewood Cliffs.
- Kartini Kartono. (2009). *Pendidikan Politik Bagian dari Pendidikan Orang Dewasa*. Bandung : Mamdar Maju.
- Panggelean. (1994). *Pendidikan Politik dan Kaderisasi Bangsa*. Jakarta : Sinar Harapan.
- Ramlan Surbakti. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Widraswara Indonesia.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik.